

Pengaruh Opini Audit, Temuan Audit, dan Tindak Lanjut Hasil Audit terhadap Tingkat Korupsi: Studi Empiris pada Pemerintahan Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat Tahun 2019-2021

Muhardimansyah^{1*}, Fefri Indra Arza²

^{1,2} Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Negeri Padang, Padang

*Korespondensi: muhar.diman.28@gmail.com

Tanggal Masuk:

18 Juli 2024

Tanggal Revisi:

08 November 2024

Tanggal Diterima:

04 Januari 2025

Keywords: Corruption Level; Audit Opinion; Audit Finding; Follow-up on Audit Results.

How to cite (APA 6th style)

Muhardimansyah & Arza, F.I. (2025). Pengaruh Opini Audit, Temuan Audit, dan Tindak Lanjut Hasil Audit terhadap Tingkat Korupsi: Studi Empiris pada Pemerintahan Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat Tahun 2019-2021. *Jurnal Eksplorasi Akuntansi (JEA)*, 7 (1), 95-106.

DOI:

<https://doi.org/10.24036/jea.v7i1.1966>



This is an open access article distributed under the [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

Abstract

This study aims to examine the effect of audit opinion, audit findings, and follow-up on the level of corruption. This type of research is causal associative with a quantitative approach. The population used in this study were all district / city local governments in West Sumatra Province in 2019-2021. The sampling technique in this study used a total sampling technique, there were 57 samples used as research samples. The data used in this study are secondary data obtained from the audit results of the Financial Audit Agency of the Republic of Indonesia, the Central Bureau of Statistics, the West Sumatra High Prosecutor's Office and the official website of each agency. The analysis method used is the multiple regression method. The results showed that audit opinion and audit findings have a positive effect on the level of corruption, follow-up on audit results has a negative effect on the level of corruption. Simultaneously, these variables have a significant influence on the level of corruption.

PENDAHULUAN

Salah satu tantangan terbesar yang dihadapi oleh pemerintah Indonesia saat ini adalah korupsi. Dalam beberapa tahun terakhir, pembangunan dan pelaksanaan pemerintahan telah menjadi masalah penting di tingkat nasional dan internasional. Sebagai contoh, data *Transparency International* (TI) mengenai Peringkat Indeks Persepsi Korupsi (*Corruption Perception Index*) untuk tahun 2019 menempatkan Indonesia pada peringkat ke-85 dari 180 negara; itu menerima nilai 40 pada skala 0 hingga 100, di mana nilai 0 menunjukkan tingkat korupsi tertinggi di negara tersebut. Pada tahun 2020, Indonesia berada di peringkat ke-102 dari 180 negara dengan nilai 37, dan pada tahun 2021, berada di peringkat ke-96 dari 180 negara dengan nilai 38. Perubahan peringkat dan nilai dari 2019 hingga 2021 menunjukkan peningkatan upaya Indonesia untuk memerangi korupsi. Namun, Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia masih di bawah rata-rata negara di ASEAN, Asia Pasifik, dan G20. Indonesia masih

berada di posisi terendah di ASEAN dibandingkan dengan Singapura (peringkat 83), Malaysia (peringkat 47), dan Thailand (peringkat 36).

Menurut laporan tren korupsi semester I 2022 dari *Indonesia Corruption Watch* (ICW), 252 kasus korupsi telah ditangani, 612 orang ditangkap, dan kerugian negara sebesar 33,6 triliun rupiah. Data ini menunjukkan tingkat kasus korupsi yang tinggi di Indonesia. Di dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2022, penegak hukum memiliki 1.387 kasus yang akan diproses selama semester pertama tahun 2022. Namun, hanya 252 kasus yang telah ditangani.

Indonesia Corruption Watch (ICW) melaporkan dalam analisis kasus korupsi berdasarkan lokasi pada semester pertama tahun 2019 bahwa Sumatera Barat mencatat 8 kasus korupsi dengan total kerugian negara (KN) sebesar 8,4 miliar rupiah dan suap senilai 493 juta rupiah. Pada semester pertama tahun 2020, Sumatera Barat mencatat 3 kasus korupsi dengan total KN sebesar 2,8 miliar rupiah. Pada semester pertama tahun 2021, *Indonesia Corruption Watch* mencatat 6 kasus korupsi dengan total KN sebesar 2,8 miliar rupiah.

Dalam menjalankan pemerintahan daerah, sangat penting bagi aparaturnya untuk mematuhi undang-undang yang telah ditetapkan. Seperti yang diungkapkan oleh Rini dan Damiati (2017), temuan audit yang menunjukkan ketidakpatuhan pemerintah daerah terhadap undang-undang dapat berfungsi sebagai indikator tingkat korupsi. Persepsi korupsi meningkat dengan jumlah temuan audit yang menunjukkan ketidakpatuhan terhadap undang-undang, yang menunjukkan kinerja dan akuntabilitas pemerintah daerah yang buruk (Liu & Lin, 2012).

Hasil pemeriksaan dibagi menjadi tiga kelompok, menurut Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI). Mereka adalah Sistem Pengendalian Internal (SPI), Opini audit, dan ketidakpatuhan terhadap peraturan undang-undang (Badan Pemeriksa Keuangan, 2020). Menurut Bastian (2018), opini audit adalah pertimbangan yang dibuat oleh profesional pemeriksa mengenai kesesuaian dan kecukupan informasi yang didokumentasikan dalam laporan keuangan. Kriteria yang digunakan untuk memberikan opini ini meliputi kepatuhan terhadap peraturan, kelengkapan pengungkapan, dan kinerja sistem pengendalian internal. Sebagaimana dikemukakan oleh Bastian (2018), opini audit dapat dibagi menjadi empat kategori: WDP, TW, KPD, dan WTP. Opini audit BPK RI terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (KPD) telah meningkat pesat selama lima tahun terakhir (2015-2019). Dibandingkan periode sebelumnya, jumlah LKPD yang memperoleh opini WTP meningkat sebesar 32% selama periode tersebut. Sebaliknya, selama periode yang sama, jumlah LKPD yang menerima opini TMP menurun sebesar 4% (IHPS I BPK RI, 2020). Berbagai kementerian, lembaga negara, dan pejabat pemerintah daerah sangat menginginkan opini audit WTP yang diberikan oleh BPK karena ini merupakan ukuran penting tingkat keberhasilan praktik tata kelola pemerintahan (Amyuianthy et al., 2020). Oleh karena itu, opini BPK sangat penting untuk mengawasi laporan keuangan pemerintah dan memastikan bahwa pemerintah mematuhi peraturan dan mencegah pelanggaran yang dapat membahayakan keuangan negara (Rini & Damiati, 2017).

Hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap pemerintah daerah adalah salah satu cara penting untuk menilai kinerja pemerintahan. Dengan mendapatkan opini "Wajar Tanpa Pengecualian" (WTP), pemerintah daerah dapat dianggap telah melaksanakan tata kelola pemerintahan dengan baik. Ini dapat mengurangi kemungkinan penyalahgunaan wewenang dan tingkat korupsi. Masyitoh et al. (2015) mendukung gagasan ini dengan menemukan bahwa tanggapan audit memiliki dampak yang signifikan dan negatif terhadap persepsi korupsi; dengan kata lain, semakin baik tanggapan laporan keuangan yang diterima, semakin rendah tingkat korupsi.

Syahrir dan Suryani (2020) juga mengatakan bahwa ada hubungan antara keputusan BPK dan tingkat korupsi. Artinya, ketika pemeriksaan menghasilkan opini yang positif, kemungkinan korupsi berkurang. Selain opini, hasil audit menunjukkan tingkat korupsi. Namun menurut

Lessmann dan Markwardt (2009) adanya desentralisasi dapat berkontribusi terhadap tingginya tingkat korupsi.

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pengaruh hasil audit pemerintah yaitu opini audit, temuan audit, dan tindak lanjut hasil audit terhadap tingkat korupsi pemerintah kabupaten/kota di provinsi Sumatera Barat. Menurut Olken (2007), ada sedikit penelitian yang menyelidiki hubungan antara audit pemerintahan dan korupsi. Menurut penelitian lain tentang korupsi, pendapat yang diberikan oleh BPK RI terkait dengan tingkat korupsi; opini yang baik menunjukkan bahwa mereka tidak terlibat dalam korupsi (Rini & Sarah, 2014). Penelitian Rini dan Sarah (2014) mendukung penelitian Khair (2015) yang mengungkapkan bahwa opini audit dan sistem pengendalian internal sangat memengaruhi kerugian negara yang menunjukkan potensi penyimpangan. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan panduan kebijakan yang lebih efisien untuk memitigasi korupsi di ranah pemerintahan kabupaten/kota di Indonesia dengan mendalami pemahaman tentang komponen yang memengaruhi tingkat korupsi serta peran sistem audit.

REVIU LITERATUR DAN HIPOTESIS

Teori Keagenan (*Agency Theory*)

Jensen dan Meckling (1976) menciptakan teori keagenan, sebuah struktur konsep yang menjelaskan hubungan kontraktual antara agen dan principal. Dalam situasi seperti ini, entitas dapat berupa individu, kelompok, atau organisasi. Teori keagenan menunjukkan hubungan antara principal dan agen melalui penggunaan instrumen kontrak. Teori keagenan menekankan penyelesaian dua masalah penting. Yang pertama adalah masalah agensi, yang terjadi ketika tujuan dan kepentingan agen dan principal tidak selaras, dan membuat principal sulit untuk memverifikasi kinerja sebenarnya agen. Yang kedua, seperti yang dijelaskan oleh Eisenhardt (1989), adalah masalah pembagian risiko, yang terjadi ketika principal dan agen memiliki preferensi yang berbeda dalam menangani risiko tertentu.

Teori Klitgaard

Teori Klitgaard, yang diajukan oleh Robert Klitgaard, menggambarkan konsep korupsi sebagai $C = M + D - A$, di mana *Corruption* (korupsi) merupakan hasil dari *Monopoly* (monopoli) ditambah *Discretion* (diskresi) minus *Accountability* (akuntabilitas). Teori Klitgaard menekankan bahwa monopoli di tangan pejabat yang memiliki kekuasaan untuk membuat kebijakan tanpa akuntabilitas dapat menyebabkan praktik korupsi. Penelitian ini akan berkonsentrasi pada aspek akuntabilitas dari teori tersebut.

Dalam situasi ini, akuntabilitas terkait dengan prinsip tata kelola perusahaan atau organisasi, yang menunjukkan bahwa pihak berwenang bertanggung jawab untuk membuat kebijakan dan membuat keputusan (Gong, 2009). Salah satu cara untuk mengurangi korupsi adalah ketidakpastian, terutama setelah desentralisasi kekuasaan (Klitgaard, 1997).

Teori Sinyal (*Signaling Theory*)

Menurut teori sinyal yang diusulkan oleh Waul (2015), agen, principal, dan pihak luar dapat mengatasi ketidakseimbangan informasi dengan mengirimkan sinyal kepada publik melalui laporan kelulusan yang baik, peningkatan sistem pengendalian internal, dan peningkatan transparansi pengungkapan informasi. Pihak yang berkepentingan dapat yakin dengan informasi kelulusan yang disajikan oleh agen dengan upaya ini. Dalam situasi seperti ini, mendapatkan pendapat independen dari pihak ketiga tentang laporan kelulusan sangat penting.

Pemerintah ingin mengirimkan sinyal kepada masyarakat, menurut teori sinyal Evans dan Patton (1987). Pemerintah akan berusaha untuk meningkatkan kesadaran publik dengan

berbagai cara, seperti memberikan laporan keluangan yang dapat diandalkan, memperbaiki sistem pengendalian internal, dan mengungkapkan informasi yang lebih luas.

Tingkat Korupsi

Korupsi umumnya didefinisikan sebagai keluntangan pribadi. Korupsi yang didefinisikan misalnya, penjualan kekayaan negara secara tidak sah oleh pejabat, *kickbacks* dalam pengadaan di sektor pemerintahan, penyulapan, dan “pencurian” (*embezzlement*) dana-dana pemerintah (Tulanakotta, 2010). Tingkat korupsi adalah ukuran yang menunjukkan seberapa meluas korupsi dalam suatu negara atau wilayah tertentu. Menilai persepsi korupsi, menggunakan indeks persepsi korupsi, atau menggunakan indeks korupsi yang diterbitkan oleh organisasi internasional terkemuka adalah beberapa indikator yang dapat digunakan untuk menilai tingkat korupsi. Tingkat korupsi tinggi dapat berdampak besar pada kemajuan ekonomi, stabilitas politik, dan kesejahteraan masyarakat (*Transparency International*, 2019).

Opini Audit

Opini audit adalah evaluasi independen yang diberikan oleh auditor mengenai keadaan laporan keluangan suatu perusahaan atau lembaga selama periode waktu tertentu (Siregar & Sari, 2020). Surat pernyataan menunjukkan penilaian ini dan tingkat kredibilitas laporan keluangan tersebut. Secara umum, opini audit yang diberikan baik di sektor swasta maupun publik dibagi menjadi empat kategori: Tidak Menyatakan Pendapat (TMP), Tidak Wajar (TW), Wajar Dengan Pengeluaran (WDP), dan Wajar Tanpa Pengeluaran (WTP).

Temuan Audit

Temuan audit merupakan kasus-kasus yang ditemukan dalam pemeriksaan BPK, dalam hal ini pemeriksaan laporan keluangan pemerintah daerah. Temuan audit dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu temuan audit atas sistem pengendalian internal dan temuan audit atas ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. Hal tersebut menunjukkan bahwa semakin banyak temuan yang dilakukan oleh Pemerintah daerah menggambarkan semakin buruknya kinerja Pemerintah daerah tersebut (Sedyaningsih, 2012).

Tindak Lanjut Hasil Audit

Menurut Pasal 1 ayat 12 UJU No. 15 tahun 2004 mengenai Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keluangan Negara, mendefinisikan rekomendasi adalah saran dari pemeriksa berdasarkan hasil pemeriksaannya, yang ditujukan kepada orang dan/atau badan yang berwenang untuk melakukan tindakan dan/atau perbaikan. Rekomendasi diberikan oleh BPK sebagai tindakan lebih lanjut dari temuan audit yang berguna sebagai saran perbaikan laporan keluangan.

Pengembangan Hipotesis

Pengaruh Opini Audit Terhadap Tingkat Korupsi

Pemeriksaan atas laporan keuangan dilakukan untuk memberikan pendapat/opini atas kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan. Opini audit laporan keuangan menunjukkan tingkat kewajaran yang mencerminkan tingkat akuntabilitas laporan keuangan yang diyakini memberikan kontribusi dalam usaha mereduksi praktik korupsi.

Hubungan antara opini audit dan kinerja pemerintah daerah telah dibuktikan secara empiris oleh Ismunawan, 2016 dimana opini audit memiliki pengaruh terhadap korupsi pemerintah daerah. Penelitian ini didukung oleh penelitian Masyitoh dkk., 2015 yang

menyatakan bahwa opini audit berpengaruh negatif terhadap persepsi korupsi. Semakin baik opini audit yang diperoleh menunjukkan semakin rendah potensi korupsi di lingkungan pemerintah daerah.

Hasil serupa juga dinyatakan dalam penelitian Rini dan Sarah, 2014 yang menyatakan bahwa terdapat kaitan antara opini yang diberikan oleh BPK RI dengan korupsi. Berdasarkan uraian diatas, maka hipotesis yang dapat dirumuskan sebagai berikut:

H1: Opini audit berpengaruh negatif terhadap tingkat korupsi.

Pengaruh Temuan Audit Terhadap Tingkat Korupsi

Temuan audit merupakan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang menunjukkan temuan audit baik temuan atas pengendalian internal maupun temuan ketidakpatuhan atas perundangundangan. Huefner, 2011 melalui penelitiannya menyatakan bahwa cara yang utama untuk mencegah terjadinya kecurangan yaitu dengan adanya sistem pengendalian internal yang kuat. Sehingga semakin banyak temuan kelemahan pengendalian internal akan meningkatkan kemungkinan terjadinya korupsi.

Ferraz dan Finan, 2011 menyatakan peraturan dalam pemerintahan dapat meningkatkan akuntabilitas yang memainkan peran penting dalam mengurangi korupsi. Begitu pula dengan Najahningrum, 2013 yang menyebutkan bahwa penegakan peraturan berpengaruh negatif terhadap kecenderungan kecurangan pada dinas DIY. Hal ini menunjukkan bahwa adanya ketidakpatuhan atas perundang-undangan akan mengakibatkan meningkatnya kecenderungan kecurangan.

Penelitian lainnya terkait temuan audit dan tingkat korupsi dilakukan oleh Masyitoh dkk., 2015 yang menyatakan bahwa temuan audit atas ketidakpatuhan pada perundang-undangan berpengaruh positif terhadap persepsi korupsi. Semakin banyak jumlah temuan audit ketidakpatuhan pada perundang-undangan menunjukkan persepsi korupsi yang lebih tinggi. Berdasarkan hasil penelitian di atas, temuan audit dapat digunakan untuk mendeteksi adanya korupsi. Berdasarkan uraian diatas, maka hipotesis yang dapat dirumuskan sebagai berikut:

H2: Temuan audit berpengaruh positif terhadap tingkat korupsi

Pengaruh Tindak Lanjut Hasil Audit Tingkat Korupsi

Menurut Liu dan Lin, 2012, pembetulan setelah adanya proses audit lebih penting dari deteksi atas temuan audit itu sendiri karena upaya untuk melakukan pembetulan audit dapat meningkatkan efektivitas proses audit. Hal serupa dikemukakan oleh Umar, 2012 bahwa dengan adanya masukan dari auditor, pihak pengambil keputusan dapat menghentikan dan mencegah terulangnya kembali kesalahan, penyimpangan, penyelewengan, serta pemborosan. Dengan melaksanakan apa yang telah direkomendasikan oleh auditor, maka pemerintah daerah telah berupaya untuk memperbaiki kesalahan dalam pertanggungjawaban penyelenggaraan negara.

Penelitian lainnya terkait hubungan tindak lanjut audit dengan tingkat korupsi dilakukan oleh Masyitoh dkk., 2015 yang menyatakan tindak lanjut hasil audit berpengaruh negatif terhadap persepsi korupsi. Hasil serupa dikemukakan oleh Liu dan Lin, 2012 bahwa tindak lanjut hasil audit berpengaruh negatif terhadap tingkat korupsi. Semakin banyak rekomendasi auditor yang ditindaklanjuti oleh pemerintah daerah menunjukkan persepsi korupsi yang lebih rendah. Berdasarkan penelitian terdahulu, dapat disimpulkan bahwa tindak lanjut hasil audit memiliki pengaruh terhadap korupsi. Berdasarkan uraian diatas, maka hipotesis yang dapat dirumuskan sebagai berikut:

H3: Tindak lanjut hasil audit berpengaruh negatif terhadap tingkat korupsi

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kausalitas yang dimana menggunakan pendekatan kuantitatif. Menurut konsep yang diuraikan Sekaran dan Bougie (2013), ada tiga kategori penelitian: eksploratif, deskriptif, dan kausal. Populasi yang diambil dalam penelitian ini adalah seluruh pemerintahan kabupaten/kota di Sumatera Barat. Secara keseluruhan, ada 19 pemerintahan kabupaten/kota yang termasuk dalam populasi. Sehingga sampel dalam penelitian ini berjumlah 57 sampel. Teknik pengambilan sampel yg digunakan dalam penelitian ini ialah *Total sampling*.

Data yang digunakan dalam penelitian ini ialah data sekunder. Data tersebut didapatkan dengan cara menggunakan data Laporan Kelulungan Pemerintahan Daerah (LKPD), IHPS (Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester) dan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) untuk periode tahun 2019-2021 dari Pemeriksa Kelulungan (BPK) Republik Indonesia dan BPK Sumatera Barat. Data jumlah kasus korupsi kabupaten/kota dari Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat serta data statistik dari Badan Pusat Statistik (BPS).

Metode analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis Regresi Linier Berganda dengan bantuan program SPSS 26. Tahap yang digunakan dalam menguji hipotesis pada penelitian ini terdiri atas analisis deskriptif, analisis induktif, uji asumsi klasik, uji model dan pengujian hipotesis.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis Statistik Deskriptif

Tabel 1
Analisis Statistik Deskriptif

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Tingkat Korupsi	57	.000	1.127	.20502	.214879
Opini Audit	57	0	1	.96	.186
Temuan Audit	57	.163	3.369	.94600	.793167
Tindak Lanjut Hasil Audit	57	0	59424	6341.28	11078.469
Valid N (listwise)	57				

Sumber: Data sekunder diolah, 2024

Berdasarkan Tabel 1, dapat dilihat bahwa sampel yang digunakan dalam penelitian ini berjumlah 57 sampel. Pada variabel Tingkat Korupsi memiliki nilai terendah 0,000 dan nilai tertinggi 1,127 dengan rata-rata 0,205 dan standar deviasi sebesar 0,214. Variabel Opini Audit memiliki nilai terendah 0 dan nilai tertinggi 1 dengan rata-rata 0,96 dan standar deviasi sebesar 0,186. Variabel Temuan Audit memiliki nilai terendah 0,163 dan nilai tertinggi 3,369 dengan rata-rata 0,946 dan standar deviasi sebesar 0,793. Variabel Tindak Lanjut Hasil Audit memiliki nilai terendah 0 dan nilai tertinggi 59.424 dengan rata-rata 6.341,28 dan standar deviasi sebesar 11.078,47.

Analisis Regresi Linear Berganda

Analisis regresi linear berganda digunakan untuk mengetahui pengaruh atau hubungan secara linier antara dua atau lebih variabel independen dengan satu variabel dependen (Priyatno, 2014). Analisis regresi linear berganda dalam penelitian ini digunakan untuk menguji hipotesis dalam penelitian ini. Peneliti menggunakan IBM SPSS 26 untuk menguji hipotesis dalam penelitian ini. Penelitian ini telah melewati uji asumsi klasik, seperti uji normalitas, uji multikolonieritas, uji auto korelasi, dan uji heteroskedastisitas.

Tabel 2
Analisis Regresi Linear Berganda

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		Sig.
	B	Std. Error	Beta	t	
1 (Constant)	.158	.158		1.004	.320
Opini Audit	-.076	.150	-.066	-.509	.613
Temuan Audit	.113	.034	.418	3.309	.002
Tindak Lanjut Hasil Audit	2.143E-6	.000	.110	.822	.415

Sumber: Data sekunder diolah, 2024

Berdasarkan Tabel 2 diatas, persamaan regresi pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

$$Y = 0,158 - 0,076 X_1 + 0,113 X_2 + 2,143E-6 X_3 + 0,158$$

Nilai Konstanta yang tercantum sebesar 0,158, dapat diartikan jika variabel opini audit, temuan audit, tindak lanjut hasil audit dianggap konstan (0), maka tingkat korupsi adalah sebesar 0,158 satuan.

Koefisien regresi variabel opini audit (b_1) bernilai negatif sebesar $-0,076$. Hal ini menunjukkan bahwa opini audit mengalami peningkatan sebesar satu satuan, maka akan menaikkan tingkat korupsi sebesar $-0,076$ satuan dengan asumsi variabel lain konstan atau tetap. Koefisien regresi variabel temuan audit (b_2) bernilai positif sebesar 0,113. Hal ini menunjukkan bahwa temuan audit mengalami peningkatan sebesar satu satuan, maka akan menaikkan tingkat korupsi sebesar 0,113 satuan dengan asumsi variabel lain konstan atau tetap. Koefisien regresi variabel tindak lanjut hasil audit (b_3) bernilai positif sebesar 2,143E-6. Hal ini menunjukkan bahwa tindak lanjut hasil audit mengalami peningkatan sebesar satu satuan, maka akan menurunkan tingkat korupsi sebesar 2,143E-6 satuan dengan asumsi variabel lain konstan atau tetap. *Error* yang terdapat dalam persamaan regresi sebesar 0,158. *Error* ini menunjukkan adanya resiko kesalahan dan bermakna sedikit atau banyak keputusan dalam penolakan atau penerimaan hipotesis mengandung kemungkinan terjadi kesalahan.

Pengujian Hipotesis

Uji F

Tabel 3 Uji F

Model		Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	.603	3	.201	5.376	.003 ^b
	Residual	1.982	53	.037		
	Total	2.586	56			

Sumber: Data sekunder diolah, 2024

Berdasarkan Tabel 3 dapat diketahui nilai F_{hitung} sebesar $5,376 > F_{tabel}$ sebesar 2,779 dan nilai signifikan sebesar $0,003 < 0,05$. Maka dapat disimpulkan bahwa Opini Audit, Temuan Audit, dan Tindak Lanjut Hasil Audit secara simultan memiliki pengaruh signifikan terhadap Tingkat Korupsi karena $F_{hitung} > F_{tabel}$ dan signifikansi $< 0,05$.

Uji Koefisien Determinasi (*R-Square*)

Tabel 4
Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.483 ^a	.233	.190	.193402	2.260

Sumber: Data sekunder diolah, 2024

Berdasarkan Tabel 4, nilai *Adjusted R Square* sebesar 0.190 atau 19%. Hal ini menunjukkan bahwa pengaruh yang dapat dijelaskan oleh variansi dari variabel independen (Opini Audit, Temuan Audit, dan Tindak Lanjut Hasil Audit) terhadap variabel dependen (Tingkat Korupsi) sebesar 19%. Sedangkan sisanya dijelaskan oleh faktor-faktor lain yang tidak dijelaskan dalam penelitian ini.

Uji Statistik

T

Tabel 5 Uji Statistik

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		Sig.
	B	Std. Error	Beta	t	
1 (Constant)	.158	.158		1.004	.320
Opini Audit	-.076	.150	-.066	-.509	.613
Temuan Audit	.113	.034	.418	3.309	.002
Tindak Lanjut Hasil Audit	2.143E-6	.000	.110	.822	.415

Sumber: Data sekunder dioah, 2024

Berdasarkan hasil olahan data statistik pada Tabel 5, pengujian hipotesis pertama yang bertujuan untuk mengetahui pengaruh opini audit terhadap tingkat korupsi diperoleh nilai koefisien regresi bertanda positif sebesar -0.076 . Pada tahapan pengolahan data juga diperoleh nilai signifikansi sebesar $0,613$ dan nilai t-hitung sebesar -0.509 . Hasil yang diperoleh tersebut menunjukkan bahwa nilai signifikansi sebesar $0,000 > 0,05$ dan t-hitung $-0.509 < 1.672$ yang menunjukkan opini audit berpengaruh negatif terhadap tingkat korupsi. Sehingga dapat disimpulkan hipotesis 1 ditolak.

Pada pengujian hipotesis kedua yang bertujuan untuk mengetahui pengaruh temuan audit terhadap tingkat korupsi diperoleh nilai koefisien regresi bertanda positif sebesar $0,113$. Pada tahapan pengolahan data juga diperoleh nilai signifikansi sebesar $0,002$ dan nilai t-hitung sebesar 3.309 . Hasil yang diperoleh tersebut menunjukkan bahwa nilai signifikansi sebesar $0,000 < 0,05$ dan t-hitung $3.309 > 1.672$ yang menunjukkan temuan audit berpengaruh positif terhadap tingkat korupsi. Sehingga dapat disimpulkan hipotesis 2 diterima.

Pada pengujian hipotesis ketiga yang bertujuan untuk mengetahui pengaruh tindak lanjut hasil audit terhadap tingkat korupsi diperoleh nilai koefisien regresi bertanda positif sebesar $2,143E-6$. Pada tahapan pengolahan data juga diperoleh nilai signifikansi sebesar

0,415 dan nilai t-hitung sebesar 0.822. Hasil yang diperoleh tersebut menunjukkan bahwa nilai signifikansi sebesar $0,000 > 0,05$ dan t-hitung $0.822 < 1.672$ yang menunjukkan tindak lanjut hasil audit berpengaruh positif terhadap tingkat korupsi. Sehingga dapat disimpulkan hipotesis 3 ditolak.

PEMBAHASAN

Pengaruh Opini Audit Terhadap Tingkat Korupsi

Hipotesis pertama pada penelitian ini menyatakan bahwa opini audit berpengaruh negatif terhadap tingkat korupsi. Berdasarkan hasil Uji T pada penelitian ini ditemukan bahwa H1 ditolak karena t_{hitung} sebesar $-0.509 < t_{tabel}$ sebesar 1.672 dengan nilai signifikansi sebesar $0,613 > 0.05$. Artinya, opini audit tidak berpengaruh terhadap tingkat korupsi. Opini audit yang baik tidak menjadi jaminan bebasnya suatu pemerintah kabupaten/kota dari korupsi. Hal ini disebabkan opini audit yang diberikan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) hanya menilai tata kelola keuangan yang dilakukan pemerintah kabupaten/kota adalah baik dan penyajian laporan keuangannya wajar, bukan benar.

Hasil penelitian ini mendukung hasil penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Heriningsih dan Marita, 2012 yang menyatakan bahwa opini audit tidak memiliki pengaruh terhadap tingkat korupsi di pemerintah daerah. Pemerintah kabupaten/kota yang mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) maupun *disclaimer* tetap terindikasi melakukan tindak pidana korupsi.

Pengaruh Temuan Audit Terhadap Tingkat Korupsi

Hipotesis kedua pada penelitian ini menyatakan bahwa temuan audit berpengaruh positif terhadap tingkat korupsi. Berdasarkan hasil Uji T pada penelitian ini ditemukan bahwa H2 diterima karena t_{hitung} sebesar $3,309 > t_{tabel}$ sebesar 1.672 dengan nilai signifikansi sebesar $0,002 < 0.05$. Artinya, temuan audit berpengaruh terhadap tingkat korupsi. Dalam hal ini semakin banyak temuan audit ditemukan bisa menjadi jaminan mengukur potensi ada atau tidaknya tingkat korupsi di pemerintah daerah.

Penelitian ini mendukung hasil penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Liu dan Lin, 2012, yang menyatakan bahwa temuan audit berpengaruh positif terhadap tingkat korupsi provinsi di China. Selain itu Huefner, 2011 yang menyatakan bahwa temuan audit atas sistem pengendalian internal dapat digunakan untuk mendeteksi adanya potensi kecurangan di pemerintah daerah.

Pengaruh Tindak Lanjut Hasil Audit Tingkat Korupsi

Hipotesis ketiga pada penelitian ini menyatakan bahwa tindak lanjut hasil audit berpengaruh positif terhadap tingkat korupsi. Berdasarkan hasil Uji T pada penelitian ini ditemukan bahwa H3 ditolak karena t_{hitung} sebesar $0.822 < t_{tabel}$ sebesar 1.672 dengan nilai signifikansi sebesar $0,415 > 0.05$. Artinya, tindak lanjut hasil audit tidak berpengaruh terhadap tingkat korupsi. Dalam hal ini semakin banyaknya tindak lanjut audit yang dilihat dari nilai perkapita yang diserahkan ke kas Negara tidak mempengaruhi tingkat korupsi.

Menurut Umar, 2012 dengan adanya masukan dari auditor, pihak pengambil keputusan dapat menghentikan dan mencegah terulangnya kembali kesalahan, penyimpangan, penyelewengan, serta pemborosan. Dengan melakukan apa yang telah direkomendasikan oleh auditor Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Pemerintah kabupaten telah berupaya untuk memperbaiki kesalahan, pengendalian internal dan kinerjanya sehingga pada akhirnya tingkat korupsi provinsi menurun.

SIMPULAN, KETERBATASAN DAN SARAN

Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pengujian hipotesis yang telah dilaksanakan, maka hasil penelitian dapat disimpulkan sebagai berikut: Opini Audit dan Tindak Lanjut Hasil Audit tidak berpengaruh terhadap Tingkat Korupsi. Temuan Audit berpengaruh terhadap Tingkat Korupsi.

Keterbatasan

Meskipun peneliti telah berusaha merancang dan mengembangkan penelitian sedemikian rupa, namun masih terdapat beberapa keterbatasan dalam penelitian ini, diantaranya: Penelitian ini merupakan metode pendekatan kausalitas dengan menggunakan data sekunder. Variabel opini audit dan tindak lanjut hasil audit dalam penelitian ini masih terlalu rendah dalam memberikan pengaruh atau keterkaitan terhadap tingkat korupsi. Tingkat generalisasi hasil penelitian ini masih belum tinggi dikarenakan sampel yang diambil dan digunakan dalam penelitian ini yaitu pemerintahan kabupaten/kota di 1 provinsi.

Saran

Berdasarkan pembahasan dan kesimpulan diatas, saran yang bisa diberikan peneliti adalah sebagai berikut: Peneliti selanjutnya diharapkan dapat menambah lebih banyak literatur yang relevan dengan topik penelitian yang diambil. Penelitian ini masih terbatas pada opini audit, temuan audit dan tindak lanjut hasil audit terhadap tingkat korupsi, untuk penelitian selanjutnya dapat dilakukan perubahan terhadap variabel bebas penelitian untuk menemukan variabel-variabel lain yang berpengaruh terhadap tingkat korupsi seperti pengungkapan laporan keuangan, tingkat pertumbuhan ekonomi, kapabilitas internal auditor atau kinerja keuangan. Pada penelitian selanjutnya diharapkan menggunakan sampel dari seluruh kabupaten/kota dan menggunakan tahun pengamatan yang lebih panjang sehingga hasil penelitian dapat merealisasikan kondisi pada seluruh kabupaten/kota di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Amyulianthy, R., Anto, A. S. Ul., & Astuti, S. B. (2020). *Temuan DAN TINDAK Lanjut HASIL Pemeriksaan Terhadap OPINI Audit (Studi pada Pemerintah Provinsi di Indonesia) TERHADAP OPINI AUDIT Pada saat melakukan pemeriksaan atas Laporan Kelulangan Badan Pelmelriksa Kelulangan (BPK) melmbelrikan opini ulntulk melngellompokk. April.*
- Atmaja, S. A., & Probohudono, A. N. (2015). Analisis Audit BPK RI Terkait Kelemahan SPI, Temuan Ketidapatuhan dan Kerugian Negara. *INTEGRITAS Jurnal Anti Korupsi*, 1(1), 81–110.
- Bastian, I. (2018). *Audit Sektor Publik Pemeriksaan Pertanggungjawaban Pemerintahan* (3rd ed.). Salemba Empat.
- Delfond, M. L., & Jiambalvo, J. (1991). and of Circumstances Accounting Errors. *The Accounting Review*, 66(3), 643–655.
- Eisenhardt, K. M. (1989). Linked references are available on JSTOR for this article : Agency Theory : An Assesment and Review. *Academy of Management*, 14(1), 57–74.
- Elvans, J. H., & Patton, J. M. (1987). Discussion of Signaling and Monitoring in Public-Sector Accounting. *Journal of Accounting Research*, 25(1987), 159. <https://doi.org/10.2307/2491084>

- Gong, T. (2009). Audit for accountability in China: An incomplete mission. *Australian Journal of Public Administration*, 68(SUPPL. 1). <https://doi.org/10.1111/j.1467-8500.2009.00617.x>
- Hulstine, R. J. (2011). Fraud Risks in Local Government: An Analysis of Audit Findings. *Journal of Forensic & Investigative Accounting*, 3(3), 111–125.
- Hulsna, N., Rahayul, S., & Triyanto, D. N. (2016). Pengaruh Opini Audit Dan Temuan Audit Terhadap Tingkat Korupsi (Studi Pada Pemerintah Daerah Di Indonesia Tahun 2017). *JAF- Journal of Accounting and Finance*, 4(1), 20. <https://doi.org/10.25124/jaf.v4i1.2713>
- Indonesia Corruption Watch 2019. *Laporan Tren Korupsi 2019*.
- Indonesia Corruption Watch 2020. *Laporan Tren Korupsi Semester I 2020*.
- Indonesia Corruption Watch 2021. *Laporan Tren Korupsi 2021*.
- Ismunawan. 2016. Tesis: *Pengaruh Faktor non Keuangan dan Keuangan Terhadap Tingkat Korupsi Pemerintah Daerah di Indonesia*. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Sebelas Maret.
- Jensen, M. C., & Meckling, W. H. (1976). Also published in Foundations of Organizational Strategy. *Journal of Financial Economics*, 4, 305–360. <http://ssrn.com/abstract=94043> Electronic copy available at: <http://ssrn.com/abstract=94043> <http://hupress.harvard.edu/catalog/JENTHF.html>
- Khair, Al. (2015). *The Effect OF The Achievements OF The FINANCIAL STATEMENTS OPINION, Internal CONTROL System, AND Evaluation Score OF Performance Accountability TO The State Losses AT The Public Sector Instances IN Indonesia*. 282.
- Kiswanto, Hajawiyah, A., & Fitriani, N. (2019). The effect of audit results and financial performance on corruption level moderated by government size. *International Journal of Economics and Business Administration*, 7(3), 250–259. <https://doi.org/10.35808/ijeba/323>
- Klitgaard, R. (1997). Cleaning up and invigorating the civil service. *Public Administration and Development*, 17(5), 487–509. [https://doi.org/10.1002/\(sici\)1099-162x\(199712\)17:5<487::aid-pad981>3.0.co;2-1](https://doi.org/10.1002/(sici)1099-162x(199712)17:5<487::aid-pad981>3.0.co;2-1)
- Lessmann dan Markward. 2009. *One Size Fits All? Decentralization, Corruption, and the Monitoring of Bureaucrats*. CESifo Working Paper No 2662.
- Liul, J., & Lin, B. (2012). Government auditing and corruption control: Evidence from China's provincial panel data. *China Journal of Accounting Research*, 5(2), 163–186. <https://doi.org/10.1016/j.cjar.2012.01.002>
- Masyitoh, R. D., Wardhani, R., & Setyanigrum, D. (2015). Pengaruh Opini Audit, Temuan Audit, dan Tindak Lanjut Hasil Audit terhadap Persepsi Korupsi pada Pemerintah Daerah Tingkat II Tahun 2008-2010. *Seminar Nasional Akuntansi 18 Universitas Sumatera Utara Medan, September 2015*, 1–26.
- Olken, B. A. (2007). Monitoring Corruption. *ISSN 2502-3632 (Online) ISSN 2356-0304 (Paper) Jurnal Online Internasional & Nasional Vol. 7 No.1, Januari – Juni 2019 Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta*, 53(9), 1689–1699. www.journal.uta45jakarta.ac.id
- Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.
- Purnamasari, H., & Harnovinsah, H. (2019). Pengaruh Temuan Audit, Opini Audit, Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Dan Karakteristik Kepala Daerah Terhadap Tingkat Korupsi Pada Pemerintah Daerah TA 2015- 2017. *Jurnal Akuntansi Publik*, 2(1).

- Rahayu, F. I. S., & Fidiana, F. (2018). Determinan Kualitas Opini Audit Pemerintah Daerah. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, 9(2), 267–279. <https://doi.org/10.18202/jamal.2018.04.9016>
- Rini, R., & Damiati, L. (2017). Analisis Hasil Audit Pemerintahan dan Tingkat Korupsi Pemerintahan Provinsi di Indonesia. *Jurnal Dinamika Akuntansi Dan Bisnis*, 4(1), 73–90. <https://doi.org/10.24815/jdab.v4i1.4933>
- Rini, & Sarah, A. (2014). Jurnal Etikonomi Vol. 13 No. 1 April 2014. *Jurnal Etikonomi*, 13(1), 1–20.
- Sedyaningsih. (2012). Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah Dan Temuan Audit BPK Terhadap Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Studi pada Pemerintah Kabupaten di Sulawesi Selatan Tahun 2009 – 2012). *Akuntansi Universitas Brawijaya*. 66(3), pp. 37–39.
- Sekaran, Ul., & Boulgie, R. (2013). Edisi 6. *Research Methods for Business*.
- Siregar R.M., & Sari P.N.(2020) *The Effect of Internal Control System and Human Resources Competencies on the Quality of Financial Statements and Its Implications for Audit Opinion in Local Government. Journal of Accounting and Investment* Vol 21 No1 Hal 83 –94
- Syahrir, R. S., & Suryani, El. (2020). Pengaruh Opini Audit Dan Temuan Audit Terhadap Tingkat Korupsi (Studi Pada Pemerintah Daerah Di Indonesia Tahun 2017). *JAF- Journal of Accounting and Finance*, 4(1), 20. <https://doi.org/10.25124/jaf.v4i1.2713>
- Transparency International Indonesia*. 2022. *Corruption Perception Index* Tahun 2022. <https://www.transparency.org/en/cpi/2022/index/idn> (Diakses pada tanggal 28 Agustus 2023)
- Tulanakotta, Theodoru M. 2010. *Akuntansi Forensik Dan Audit Investigatif*. Jakarta: Salemba Empat.
- Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.
- Utary, A. R. (2014). *Audit Sektor Publik* (1st ed.). Yogyakarta: Interpeka.
- Waul, I. (2015). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Keterseediaan Dan Keteraksesan Internet Financial Reporting Oleh Pemerintah Daerah. In *Diponegoro Journal of Accounting* (Vol. 4, Issue 4).
- Wibowo, A., & Rossieta, H. (2009). Faktor-Faktor Determinasi Kualitas Audit – Sulut Studi Dengan Pendekatan Earnings Surprise Benchmark. *Jurnal Akuntansi*, 2(2006), 34.